

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5 %	5,1%*	4,55%	89,3 %
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing					
2.1	Indikator 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,30 %	1,99%	2,28%	114,57 %
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Efektif					
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah	4 KSEP dari 4 KSEP	1 dari 4 KSEP	1 dari 4 KSEP	100 %
3.2	Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	16.7%	41 %	245,95 %
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata					

4.1	Indikator 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	5,75%	5,75%	100 %
4.2	Indikator 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Jumlah	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.277,17	USD 1.277,17	100%
V	Sasaran Program 5 Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3	4	133 %
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3	3	100 %
VII	Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
7.1	Indikator 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	85 %	21 %	21 %	100 %

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1: **Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja: Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini diukur salah satunya melalui peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Untuk mendukung peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, dengan Kementerian Perindustrian sebagai *stakeholder* atau mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara industri pengolahan migas berada di bawah koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2024, industri pengolahan mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri Pengolahan non migas mencakup 16 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam
10. Industri Logam Dasar
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
12. Industri Mesin dan Perlengkapan
13. Industri Alat Angkutan
14. Industri Furnitur
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan target peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut: (i) Tahun 2025: 5,50% dan (ii) Tahun 2029: 8,14%. Untuk menetapkan target kontribusi tahunan pada periode antara tahun 2025 dan 2029, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028, dilakukan *forecasting* (peramalan) menggunakan deret waktu (*time series*) data lima tahun terakhir (2021 s.d. 2024). Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh target kontribusi industri pengolahan terhadap PDB untuk tahun-tahun tersebut

sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,70%; (ii) Tahun 2027: 6,85%; dan (iii) Tahun 2028: 7,81%.

Kontribusi industri pengolahan dibagi menjadi dua yaitu industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil dan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka. Kontribusi industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil meliputi 9 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sedangkan kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka. meliputi 6 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; (ii) Industri Logam Dasar; (iii) Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; (iv) Industri Mesin dan Perlengkapan; (v) Industri Alat Angkutan; dan (vi) Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Target persentase realisasi rencana aksi Peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan tahun 2025 adalah sebesar **5.5%**.

Pengukuran Peningkatan Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Pengolahan melalui formula:

$$\text{Peningkatan NTB Industri Pengolahan (\%)} = \sum \frac{(\text{NTB Industri Pengolahan } t - \text{NTB Industri Pengolahan } t-1)}{\text{NTB Industri Pengolahan } t-1}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 5,5%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029 Adapun target kinerja ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulan.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan yang telah terealisasi sebesar 4,55 % atau mencapai 82,73 % dari target Tahun 2025 sebesar 5,5 % dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5%	4,55 %	82,73 % (Memuaskan)

Adapun besaran realisasi peningkatan kontribusi Industri AKFT terhadap PDB triwulan I tahun 2025 yaitu 0,65% dengan capaian kinerja sebesar 18% dari target tahunan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
	Pemetaan isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan pemetaan isu dan permasalahan strategis melalui beberapa kegiatan ;</p> <p>a. berkolaborasi dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Kebijakan Energi Bersih untuk Investasi dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025.</p> <p>b. memetakan potensi Kerja Sama Internasional menghasilkan inisiasi dan komitmen kerjasama dalam investasi hilirisasi industri, energi bersih, transisi energi, pembangunan IKN, <i>capacity building</i> di Indonesia (tindak lanjut pertemuan ke-52 UNIDO pada tanggal 25-27 November 2025, persiapan pertemuan WGTII ke-6 Rusia tanggal 11,12,21 dan 24</p>

			<p>Maret 2025, persiapan bahan EU-ASEAN business council tanggal 5 Februari 2025, Pembahasan Pelatihan IKM-BMWK Jerman pada tanggal 21 Maret 2025, serta Pembahasan Program Tech X Singapura pada tanggal 20 Januari 2025)</p> <p>c. Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan rapat koordinasi impor garam farmasi pada tanggal 12 dan 25 Februari 2025 dibutuhkan masa transisi kesiapan produksi garam nasional untuk memastikan ketersediaan bahan baku industri garam dalam negeri</p> <p>d. Perkembangan dekarbonisasi industri, rapat 4 Maret 2025 sebagai Rencana Kerja Pemerintah 2025 mendorong pembangunan rendah karbon yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2050. Strategi upaya dekarbonisasi meliputi (i) rencana kebijakan pengurangan emisi dengan mengatur</p>
--	--	--	--

			<p>monitoring, reporting dan verifikasi (MRV) serta pertukaran emisi industri; dan (ii) pengembangan konsep Ekosistem Industri Hijau yang dapat menghubungkan seluruh pemangku kepentingan tersebut agar bisa bersinergi dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Uni Eropa akan segera menerapkan periode implementasi kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (EU-CBAM) pada tahun 2026.</p> <p>e. Aksi penguatan tata niaga impor melalui RPP TPTATI dengan target penyelesaian Februari 2025 dan Renaksi Stranas PK 2025-2026 pada tanggal 6 Maret 2025 sebagai salah satu upaya evaluasi kebijakan lartas untuk memperbaiki tata kelola impor.</p> <p>f. Penguatan pasar (dalam dan luar negeri) melalui Revisi Kepres 24/2023 dan Kepmenko No 416/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor nasional yang dilaksanakan</p>
--	--	--	--

			<p>pada tanggal 21 Maret 2025, Pelaksanaan <i>Business Matching</i> peningkatan P3DN yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025.</p> <p>g. Diskusi strategi, kebijakan dan tantangan mendorong pengembangan Industri hasil hutan, perkebunan, minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar untuk meningkatkan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025. Perlu adanya substitusi impor dan diversifikasi produk hilir.</p> <p>h. Usulan Mitigasi Kelangkaan Bahan Baku Kelapa Bulat di dalam Negeri (Pelaksanaan PE Kelapa) dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025. Disepakati tarif PE (<i>ad valorem</i>) kelapa bulat 20%; kopra 12%; CCNO 7.5%; produk hilir 1% dan akan dievaluasi dalam waktu 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan</p>
	Pengumpulan data dan informasi industri	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait antara lain:

	pengolahan khususnya non-migas		<p>a. Dokumen Pusat Data Industri (Pusdatin) Kemenperin dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja industri dalam negeri dilaksanakan secara berkala dan diupdate oleh Kemenperin.</p> <p>b. Update Perekonomian dan Perkembangan Industri AKFT dalam rangka menggambarkan perkembangan industri sampai dengan saat ini dan dilaksanakan secara berkala.</p>
	Pemetaan isu strategis terkait peningkatan utilisasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Terlaksana	<p>a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Kontribusi Industri Logam Bagi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025. Tantangan yang masih dihadapi: (i) industri hilir kesulitan mengakses produk hulu industri logam; (ii) masih beredarnya logam impor yang tidak memenuhi SNI; (iii) pemberlakuan CBAM; dan (iv) keterbatasan sumber energi bersih. Kontribusi industri logam dapat ditingkatkan dengan memenuhi kebutuhan pasar</p>

			domestik melalui fasilitasi akses pasar industri hilir maupun menengah kepada hulu. Selain itu, para stakeholder memberi masukan perlunya pengaturan kuota impor atas jenis produk yang sudah dihasilkan dalam negeri, serta review regulasi impor untuk meningkatkan daya saing.
	Identifikasi kendala/permasalahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	Terlaksana	<p>a. Telah dilaksanakan penyusunan draft naskah urgensi pengembangan ekosistem industri baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)</p> <p>b. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pengembangan dan implementasi teknologi semikonduktor dan Artificial Intelligence (AI) pada 6 Februari 2025 dengan hasil: penguatan kerjasama antara Indonesia – Jepang yang diarahkan pada pengolahan pasir silika menjadi electronic grade silicon untuk bahan baku semikonduktor; serta technology transfer dengan universitas padjajaran untuk pengolahan solar grade silicon semikonduktor yang</p>

			butuh tingkat kemurnian hingga 9-11N.
--	--	--	---------------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Diskusi dengan Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian pada tanggal 14 Januari 2025 terkait : (i) Strategi, kebijakan dan tantangan untuk mendorong pengembangan Industri makanan, hasil laut dan perikanan; (ii) Kontribusi industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap peningkatan PDB, khususnya PDB Maritim. Adapun komoditas hilirisasi potensial pada industri ini meliputi rumput laut, udang, rajungan. Tantangan utama yang dihadapi adalah pengadaan cold storage, industri pioneer pengolahan albumin, kolagen dan gelatin dari ikan untuk meningkatkan nilai tambah
2. Diskusi dengan Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian pada tanggal 18 Februari 2025 terkait Implementasi Permenperin Nomor 3 Tahun 2025 Standar Nasional Minyak Goreng Sawit. Diketahui sebagian besar repacker telah masuk dalam KBLI 10437, namun beberapa pelaku usaha masih mengalami kendala perizinan sehingga diperlukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait implementasi Permenperin tersebut.
3. Diskusi APKI 2024 dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan tema pembahasan "Mendorong Kontribusi Industri Pulp dan Kertas terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Strategi kebijakan, ekonomi Sirkular, dan perluasan Akses Pasar Global". Isu keberlanjutan di negara maju menjadi tantangan dalam perkembangan industri dan penerapan ekonomi sirkular menjadi alternatif pemenuhan rantai pasok industri.
4. Rapat koordinasi bersama K/L terkait rencana perubahan Perpres 55/2019 Jo Perpres 79/2023 pada tanggal 3 Februari (Rapat Koordinasi Eselon 1), tanggal 28 Februari (Rapat Koordinasi bersama Biro HO), dan tanggal 19 Maret 2025 (Rapat Koordinasi Teknis Eselon 2).
5. Penyusunan naskah urgensi RPerpres tentang Perubahan Kedua Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada

- anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional. Industri dalam negeri mengalami peningkatan harga bahan baku dan penurunan produksi. Hal ini menyebabkan kinerja dan utilitas industri menjadi tidak optimal.
2. Perubahan struktur organisasi di seluruh K/L beserta penyesuaian nomenklatur yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar K/L untuk beradaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo.
3. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka memitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, *perang* dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, kami mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau *menggunakan fasilitas zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.

4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) *Kementerian Perindustrian* sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

2	Sasaran Program 2: Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing
---	---

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Laju

Pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Latar Belakang

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih dibawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Co- operation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya

ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3,30% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan I sebesar 1,99%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja yang telah terealisasi sebesar 2,28% atau mencapai 114,57% dari target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1,99% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja Pengolahan	Persentase	1,99%	2,28%*	114,57% (Memuaskan)

*BPS (diolah)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	<p>Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terkait dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, telah dilaksanakan <i>initial discussion</i>

			<p>dengan Prospera pada 19 Maret 2025 yang membahas beberapa faktor yang menyebabkan TPAK Perempuan rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja, telah diterbitkan PP No. 6/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tanggal 7 Februari 2025. • Telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian hak-hak pekerja PT Sritex pasca PHK dan Rencana Penyaluran Pekerja pada Industri pada tanggal 3 Maret 2025.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan *Pilot Project* kerja sama Bilateral Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja *Specific Skill Worker*. Saat ini telah dikirimkan 92 CV calon peserta Tech:X dari Indonesia dan 3 diantaranya telah lolos seleksi. Sedangkan pihak Singapura telah mengirimkan 22 CV yang sedang dalam tahap review oleh perusahaan Indonesia.
- Telah dilaksanakan rapat koordinasi Tim Transisi Program Kartu Prakerja ke Kemnaker pada tanggal 7 Januari 2025 dan 11 Februari 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan *National Dialogue on Responsible Digital Wage Payments for SMEs and Workers in Indonesia* pada tanggal 20 Februari 2025.
- b) Pelaksanaan Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 bersama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan *National Dialogue on Responsible Digital Wage Payments for SMEs and Workers in Indonesia* pada tanggal 20 Februari 2025 dilakukan dengan skema pembiayaan *cost sharing* dengan ILO yang diselenggarakan di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, sehingga proyeksi efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan adalah sebesar kurang lebih Rp 100.000.000. Selain itu, juga dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya lainnya, antara lain:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi teleconference seperti Zoom.
2. Telah dibuat tempat penyimpanan file berbasis cloud yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga meningkatkan kinerja.
3. Pengelolaan tata persuratan telah dilaksanakan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja dan memberikan dampak pada efisiensi anggaran karena dinilai mengurangi belanja ATK.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan PDB per tenaga kerja, ditunjang oleh beberapa aspek lain seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, penerapan teknologi baru di industri, iklim investasi yang mendukung. Sehingga ketercapaian indikator tersebut, tidak hanya melibatkan dari sisi ketenagakerjaan utamanya melalui peningkatan kualitas SDM, namun juga harus didukung dengan aspek-aspek tersebut.
2. Ketidakpastian perekonomian global serta kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menyebabkan penurunan kepesertaan Jamsostek

akibat peningkatan PHK, khususnya di sektor formal dan jasa konstruksi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Rencana pelaksanaan kegiatan yang fokus untuk memetakan isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, utamanya di tengah ketidakpastian perekonomian global serta kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.

3	Sasaran Program 3: Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
---	---

Pencapaian Sasaran Program 3: **Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing
2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing

Latar Belakang

Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi merupakan sasaran strategis yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan-kawasan unggulan yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Penguatan daya saing dilakukan melalui integrasi sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Indikator ini mengukur besarnya jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang telah dinyatakan selesai secara perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh Kementerian Koordinator, serta telah mendapatkan dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait.

KSE yang menjadi target merupakan KI, KEK, KSPN, dan/atau KPBPB yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, terdapat 4 KSE Prioritas yang menjadi target dari 12 KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Kriteria kawasan strategis ekonomi yang diprioritaskan meliputi:

1. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
2. Mendukung kebijakan dan arahan Presiden;

3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi;
4. Menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.

Data yang digunakan bersumber dari antara lain:

1. Progres pelaksanaan KSE berdasarkan dengan data monitoring dan evaluasi;
2. Realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM;
3. Data Investasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Badan Pengusahaan BBK dan/atau Dewan Kawasan BBK, dll); dan/atau
4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kawasan Ekonomi dari Badan Usaha Pengelola.

Tercapainya target atas Indikator “Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No. 66/2024 tentang HPT, Perpres No. 79/2024 tentang P3NK, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
3. Paparan terkait Progres Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
4. Laporan Semester terhadap Hasil Evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
5. Laporan evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
6. Laporan kepada Presiden terhadap Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
7. Kajian Dampak Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas terhadap nasional dan regional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 4 KSEP penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 Adapun target triwulan sebesar 1 KSEP dari 4 KSEP

Pengukuran realisasi kinerja IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing didasarkan pada jumlah realisasi Kawasan Strategis ekonomi sebanyak 4 (empat) Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas.

Kriteria KSE yang berdaya saing memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi yang Berkelanjutan: Kawasan telah menunjukkan adanya investasi yang berkelanjutan, di mana pengembangan kawasan dilakukan secara konsisten melalui realisasi investasi secara kontinyu dalam pembangunannya.
2. Ketersediaan Aksesibilitas Eksternal: Kawasan memiliki akses yang memadai dari luar, termasuk ketersediaan jalan akses menuju kawasan

serta keterhubungan dengan pelabuhan atau bandara sebagai bagian dari sistem logistik yang mendukung.

3. Keberadaan Badan Pengelola atau Investor: Terdapat badan pengelola kawasan atau pihak investor yang aktif berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.
4. Status Operasional dan Kesiapan Pembangunan: Kawasan telah siap beroperasi dan mendukung kegiatan pembangunan, ditunjukkan dengan kesiapan dalam menerima tenant serta telah terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di dalam Kawasan

Dalam hal, KSE yang ditargetkan belum memenuhi 4 kriteria yang ditentukan maka belum mencapai target yang ditentukan.

Hasil IKU ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Total\ KSEP = \sum Jumlah\ KSEP\ yang\ telah\ memenuhi\ kriteria\ dan\ beroperasi$$

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing yang telah terealisasi sebesar 1 KSEP atau mencapai 25 % dari target Tahun 2025 sebesar 4 KSEP dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah	4 KSEP dari 4 KSEP	1 KSEP	25 % (Memuaskan)

Hingga triwulan I tahun 2025, jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) telah terealisasi sebesar 1 dari 4 yang didapatkan dari jumlah KSEP yang telah selesai dibandingkan dengan jumlah KSEP yang ditargetkan selesai pada triwulan I tahun 2025. Jumlah KSEP pada triwulan I didapatkan dari jumlah KSEP yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi pada triwulan I tahun 2025. Penyelesaian Jumlah KSEP yang Berdaya Saing yang dicapai dalam target triwulan 1 ini adalah jumlah KSEP yang telah selesai yaitu pengembangan Kawasan Industri Batang yang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif.

Sampai dengan akhir Triwulan I, telah dilakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas, antara lain:

1. Koordinasi dan monitoring dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk memastikan kepastian penyelesaian pembangunan di kawasan strategis.
2. Koordinasi terkait alokasi dan penyerapan anggaran pengadaan tanah bersama LMAN guna mendukung kelancaran pembangunan kawasan.

3. Koordinasi evaluasi proyek-proyek eksisting dan usulan baru yang berlokasi dalam kawasan prioritas, sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan ke depan.
4. Sosialisasi kepada pemerintah daerah guna membangun pemahaman dan dukungan terhadap arah pengembangan kawasan strategis.
5. Diseminasi capaian pengembangan kawasan melalui media nasional sebagai bentuk transparansi dan upaya meningkatkan partisipasi publik.

IKU Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing ini merupakan suatu IKU baru di unit kerja sehingga masih belum terdapat perbandingan dengan pelaksanaan IKU sebelumnya. Namun, untuk pelaksanaan renaksi di IKU tersebut telah berhasil memenuhi target triwulan I tahun 2025 yang menjadi target.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
	Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 4 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas dengan K/L terkait serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) pada tanggal 17 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Dukungan Kementerian/Lembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 21 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri IKIP pada tanggal 3 Maret 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Permohonan PKKPR di

			Kawasan KI IHIP pada tanggal 14 Maret 2025
	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di 4 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Keanggotaan Dewan Nasional KEK pada tanggal 8 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Kawasan Industri ASPIRE Stargate oleh PT Stargate Mineral Asia di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tanggal 13 Februari 2025 • Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri IKIP pada tanggal 3 Maret 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Lanjutan Persiapan

			Kunjungan Bapak Presiden RI di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada tanggal 18 Maret 2025
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pada 14 Februari 2025.
- b. Telah dilaksanakan Rapat Pengumpulan Informasi Awal atas Pengawasan Program Penguatan Investasi pada 18 Februari 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi teleconference dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Adanya kendala pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas
- Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

Latar Belakang

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang Siap Beroperasi mencerminkan capaian implementasi pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dinyatakan Telah Selesai adalah sebagai Berikut:

1. Sektor Kawasan (contohnya Kawasan Industri). Proyek dinyatakan selesai apabila telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang berlaku secara efektif.
2. Sektor Transportasi, Energi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sanitasi. Proyek dianggap selesai ketika telah memasuki tahap operasional atau mulai beroperasi secara fungsional.
3. Sektor Bendungan. Proyek dikategorikan selesai saat dimulainya proses pengisian awal bendungan (*impounding*), setelah seluruh konstruksi bendungan dinyatakan tuntas.

Pencapaian terbangunnya PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, daftar PSN terbaru mencakup 228 proyek dan 16 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator “Penyelesaian Proyek Strategis Nasional” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional;
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan Project Completion Report (PCR);
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional.

Formula pengukuran target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2025 dihitung dengan membandingkan jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total proyek yang ditargetkan selesai pada tahun tersebut. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan persentase capaian realisasi proyek terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan triwulanan atau tahunan.

Cara Pengukuran target penyelesaian PSN di Tahun 2025:

1. Identifikasi PSN yang masuk ke dalam Major Project RPJMN;
2. Menentukan target jumlah PSN di tahun 2025 sebanyak 12 proyek,

Formula perhitungannya =

$$\text{Persentase Penyelesaian PSN} = \frac{(\sum \text{proyek selesai})}{\sum \text{target proyek selesai}} + 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 83% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 Adapun target triwulan sebesar 16% .

Adapun rincian Realisasi IKU 3.2 yaitu Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga TW I 2025 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	16.67%	20,08% (Memuaskan)

Hingga triwulan I tahun 2025, persentase penyelesaian PSN telah terealisasi sebesar 16.7% yang didapatkan dari persentase jumlah PSN yang telah selesai dibandingkan dengan jumlah PSN yang ditargetkan selesai pada triwulan I tahun 2025. Persentase penyelesaian PSN pada triwulan I didapatkan dari penyelesaian pembangunan 2 dari 12 proyek pada triwulan I tahun 2025. Adapun 2 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata hingga triwulan I tahun 2025 antara lain:

No.	Nama Proyek	Sektor
1.	Nama Proyek	Sektor
2.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kawasan

Untuk tahun 2025, ditargetkan 12 PSN selesai. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mendorong 12 PSN agar dapat selesai di tahun 2025. Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
SPAM Benteng Kobema	Air Bersih Dan Sanitasi
SPAM Wasusokas	Air Bersih Dan Sanitasi
Bendungan Jragung	Bendungan dan Irigasi
Jalan Tol Sigli Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pelabuhan Benoa	Pelabuhan
KI Kuala Tanjung	Kawasan
KI Bantaeng	Kawasan
KI Tanah Kuning	Kawasan
KI Kendari	Kawasan
KI Wiraraja Green Renewable Energy	Kawasan
KI Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran	Kawasan
KI Pulau Penebang	Kawasan

Sampai dengan Triwulan I, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain:

1. Koordinasi dan Monitoring dengan PJPk terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
2. Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
3. Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
4. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
5. Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2025 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Percepatan Penambahan Pengadaan Tanah Proyek PSN Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada tanggal 13 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Usulan Realokasi Lintas Sektor Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2025 pada tanggal 13 Januari 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Usulan Alokasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2026 pada tanggal 30 Januari 2025.
2.	Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan PSN Sektor Kawasan pada tanggal 9 Januari 2025 dan 16 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Sumber Daya Air (Bendungan, Irigasi, dan Tanggul Laut) Tahun 2025 pada tanggal 15 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi dan Teknologi pada tanggal 16 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Transportasi

			<p>pada tanggal 21 Januari 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Jalan Tol pada 22 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Air Minum, Air Baku dan Sanitasi Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Ruang Lingkup PSN sektor Bina Marga di Kawasan Perbatasan dan IKN pada tanggal 7 Februari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Ketapang pada tanggal 12 Februari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (KI IGIP) pada tanggal 13 Februari 2025 Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Maret 2025.
3.	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Dukungan World Bank terkait Implementasi P3NK pada tanggal 13 Januari 2025

4.	Rapat Koordinasi untuk penyusunan regulasi turunan terkait skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Dukungan World Bank terkait Implementasi P3NK pada tanggal 13 Januari 2025
5.	Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN	Belum terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah saat ini masih berada dalam tahap persiapan. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hasil revisi Peraturan Menteri Koordinator terkait daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
6.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2025 kepada Presiden	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Semester II Tahun 2024 kepada Presiden.
7.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan siaran Pers melalui website ekon.go.id terkait evaluasi periodik capaian PSN, termasuk Tropical Coastland di Banten oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 22 Januari 2025.
8.	Evaluasi dampak ekonomi dan manfaat PSN yang telah selesai	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN Kawasan Industri Indonesia Hualu Indonesia Park (KI IHIP) pada tanggal 20 Maret 2025
9.	Pengusulan PSN baru	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyiapan Pengusulan Program Sektor

			Perumahan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 24 Februari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyiapan Pengusulan Program Sektor Perumahan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 4 Maret 2025
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi teleconference dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses penyusunan revisi Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dituangkan dalam Peraturan Menko masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait. Saat ini, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata juga tengah mengevaluasi baik usulan proyek baru maupun proyek yang sudah ada, termasuk mempertimbangkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar PSN.
2. Revisi Peraturan Presiden terkait KPPIP masih berada dalam tahap persiapan administratif dan koordinasi antarlembaga, sebelum dapat diajukan secara resmi.
3. Terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan, khususnya terkait permasalahan pengadaan lahan yang masih berlangsung, seperti tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, lahan di kawasan hutan, serta tanah milik instansi. Permasalahan ini mencakup aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.
4. Masih terdapat hambatan terkait kebutuhan tambahan anggaran atau pendanaan untuk sejumlah proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sebagai upaya untuk menyelaraskan substansi kebijakan, menghimpun

masukannya teknis, serta memastikan adanya dukungan dan kesepahaman lintas instansi terhadap arah perubahan kebijakan yang sedang disusun.

2. Melaksanakan koordinasi lanjutan apabila terjadi hambatan (debottlenecking) dalam proses pembahasan. Bila muncul kendala atau perbedaan pandangan, maka akan dilakukan dialog ulang dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang konstruktif dan menjaga agar proses tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Diperlukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas permasalahan pengadaan lahan dan perizinan yang masih menjadi kendala.
4. Perlu disiapkan skema pembiayaan alternatif guna mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
5. Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian isu yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi kebijakan.

4

Sasaran Program 4:

Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata

Pencapaian Sasaran Program 4: **Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata** Saing ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman
2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pertumbuhan
Sektor
Akomodasi
Makanan dan
Minuman**

Latar Belakang

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif salah satunya sektor pariwisata harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Dalam pengembangan sektor pariwisata, aspek utama yang menunjukkan perkembangan kinerjanya adalah penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan sektor jasa yang diperkirakan akan terus tumbuh dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Dalam penghitungannya sektor akomodasi makanan dan minuman mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung. Sektor ini menjadi indikator kinerja utama dari sektor pariwisata dikarenakan sektor ini merupakan sektor dengan *share* atau kontribusi terbesar terhadap PDB (sebesar 2,64% pada tahun 2024) dibandingkan sektor lain yang terkait dengan pariwisata, seperti jasa perjalanan, hiburan yang masuk dalam sektor jasa lainnya (sebesar 2,05%).

Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu (t_1) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya ($t-1$). Persentase peningkatan nilai tambah sektor akomodasi makanan dan minuman diperoleh dengan mencari selisih antara PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t_1 dengan PDB akomodasi makanan minuman pada tahun $t-1$. Adapun formulasi penghitungan pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

$$[(PDBakmm_{t_1} - PDBakmm_{t-1}) / PDBakmm_{t-1}] \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 9,53% yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman yang telah terealisasi sebesar 5,75% atau tercapai 60,34% dari target tahun 2025 sebesar 9,53% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	5,75%	60,34% (Memuaskan)

Capaian kinerja triwulan I 2025 sebesar 5,75% didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik. Secara akumulatif, total kunjungan wisatawan domestik pada triwulan I 2025 telah mencapai 250,57 juta kunjungan, meningkat 12,71% dari triwulan I 2024 sebesar 282,41 juta kunjungan. Peningkatan kunjungan ini dipengaruhi oleh perubahan preferensi wisatawan untuk memilih alternatif liburan yang lebih terjangkau sehingga berdampak pada penurunan minat terhadap perjalanan ke luar negeri dan meningkatnya ketertarikan terhadap destinasi domestik.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 22 Januari 2025, telah dilaksanakan Pertemuan dengan Telkom untuk berdiskusi terkait digitalisasi perizinan event untuk memetakan kendala yang dihadapi saat ini • Pada 22 Januari telah dilaksanakan pembahasan strategi promosi produk warisan nusantara dengan Desainer Lokal (Didiet Maulana) • Pada 11 Februari, telah dilaksanakan diskusi dengan Bappenas terkait Isu Strategis Kepariwisata dalam RPJMN 2025-2029 • Pada 21 Februari, telah dilaksanakan diskusi mengenai isu pariwisata di Indonesia dengan World Bank
----	--	------------	---

	Pengumpulan data dan informasi terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Selama bulan Februari, telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pembenahan isu yang telah dipetakan sebelumnya. Pada 24 Februari 2025, telah dilaksanakan pembahasan terkait keberlanjutan digitalisasi perizinan penyelenggaraan event yang telah dikembangkan oleh PT. Telkom Indonesia bersama POLRI, KemenInves/BKPM, KemenPar, dan Bank Mandiri. • Pada 13 Maret 2025, telah dilaksanakan diskusi kolaborasi APIEM pada SDM bidang penyelenggaraan event • Pada 19 Maret 2025, dilakukan diskusi tindak lanjut dengan World Bank terkait pengembangan pariwisata Indonesia
--	---	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut

1. Mengikuti isu pembaharuan regulasi terkait taman bumi (geopark) sebagai salah satu pilihan diversifikasi destinasi pariwisata.
2. Menerima audiensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ekosistem pariwisata, termasuk penyelenggara event seperti Campursari dan Sail to Indonesia.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Memahami kendala yang dialami dalam pengesahan regulasi taman bumi (geopark) dan kaitannya dengan pengembangan pariwisata.
2. Pemetaan potensi diversifikasi pariwisata dari para penyelenggara event.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat

koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utama dalam mencapai target Triwulan I Tahun 2025 adalah penerapan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, terutama terkait perjalanan dinas dan MICE, berdampak negatif pada sektor akomodasi, makanan, dan minuman. Belanja Pemerintah melalui perjalanan dinas berkontribusi langsung pada perjalanan wisatawan dan mendukung pelaku usaha seperti hotel, jasa makanan dan minuman, serta pusat konvensi. PHRI mengestimasi efisiensi oleh Pemerintah berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 13 triliun Rupiah bagi perhotelan nasional selama 2025, yang disebabkan oleh menurun drastisnya pemesanan akomodasi sehingga berdampak pada penurunan pendapatan sebesar 8,7 triliun Rupiah serta menurunnya pemesanan paket meeting dan penggunaan ruang rapat berdampak pada penurunan pendapatan sebesar 4,3 triliun Rupiah. Selain itu, dinamika perekonomian global juga berdampak pada ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional yang menyebabkan terjadinya PHK terhadap tenaga kerja. Kondisi tersebut menyulitkan kondisi perekonomian rumah tangga, dimana penerimaan rumah tangga hilang diikuti dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga melalui inflasi IHK. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan kemampuan atau daya beli masyarakat, khususnya untuk kebutuhan tersier seperti pariwisata.

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi 1,03% secara Y-on-Y pada Maret 2025 di angka 107,22. Inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, termasuk diantaranya yang terbesar berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,26%), kelompok makanan, minuman, dan tembakau (2,07%), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,17%). Inflasi tersebut diikuti dengan penurunan tabungan masyarakat sehingga menahan pengeluaran untuk berwisata. Berdasarkan survei konsumen BI, proporsi tabungan kelompok masyarakat

menengah (kelompok pengeluaran lebih dari 5 juta/bulan) menurun menjadi 16,3% (Feb 2025) dari sebelumnya 19,3% (Jan 2024)

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyelesaian permasalahan ekosistem pariwisata. Penguatan ekosistem pariwisata menjadi kunci untuk meredam dampak dari berbagai kendala yang dihadapi sektor pariwisata. Tekanan inflasi IHK pada kelompok makanan, minuman, dan rekreasi dapat dikendalikan melalui integrasi rantai pasok lokal dan penguatan desa wisata agar harga tetap kompetitif sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Penurunan tabungan masyarakat yang membatasi konsumsi tersier dapat dijawab dengan inovasi paket wisata, *dynamic pricing*, dan digitalisasi platform reservasi yang memberi fleksibilitas bagi wisatawan. Sementara itu, skema reskilling tenaga kerja pariwisata, insentif bagi UMKM kuliner dan kreatif, serta promosi wisata berbasis kearifan lokal yang biayanya relatif terjangkau juga menjadi jawaban atas kondisi ketidakstabilan makroekonomi.
2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dapat menjadi instrumen kunci untuk meredam keempat kendala yang ada secara bersamaan. Dengan memperluas jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang lebih efisien serta menyediakan pilihan moda transportasi dengan harga terjangkau, pemerintah dapat mengurangi dampak kontraksi belanja perjalanan dinas dan MICE, karena arus wisatawan dapat tetap terjaga melalui perjalanan individu maupun kelompok non-dinas yang lebih mudah dan murah. Aksesibilitas yang lebih baik juga membantu menekan biaya logistik sektor akomodasi dan makanan-minuman, sehingga inflasi yang dipicu dari sisi biaya dapat diredam dan harga bagi konsumen lebih terkendali. Bagi masyarakat yang daya belinya tertekan akibat menurunnya tabungan maupun pendapatan karena PHK, konektivitas yang baik memungkinkan mereka mengakses destinasi wisata domestik dengan ongkos lebih rendah, sehingga pariwisata tetap terjangkau dan tidak sepenuhnya terhenti. Dengan demikian, peningkatan konektivitas tidak hanya memperbesar pasar wisatawan domestik dan internasional, tetapi juga menciptakan multiplier effect berupa stabilisasi permintaan pariwisata, menjaga keberlangsungan usaha perhotelan, kuliner, dan rekreasi, sekaligus menopang ketahanan ekonomi rumah tangga dalam situasi penuh tekanan makroekonomi.
3. Perbaikan tata kelola destinasi pariwisata. Perbaikan tata kelola destinasi pariwisata dapat menjadi instrumen strategis pemerintah untuk meredam keempat kendala yang ada secara simultan. Peningkatan standar layanan dan integrasi rantai pasok destinasi juga mampu menekan biaya operasional pelaku usaha, sehingga inflasi di sektor makanan, minuman, dan rekreasi dapat terkendali tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, tata kelola yang baik mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak pariwisata yang transparan, yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan subsidi silang atau

insentif bagi wisatawan domestik berpendapatan menengah yang tabungannya menurun. Dengan destinasi yang dikelola lebih efisien, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan wisata terjangkau, sehingga daya beli yang tertekan akibat inflasi dan PHK tetap memiliki saluran konsumsi produktif.

4. Perumusan kebijakan pembiayaan pengembangan pariwisata. Upaya perbaikan melalui perumusan kebijakan pembiayaan pengembangan pariwisata dapat menjadi instrumen kunci untuk meredam tekanan dari keempat kendala yang ada. Kebijakan pembiayaan yang mendukung diversifikasi produk wisata berbasis komunitas dan UMKM dapat membantu menahan laju inflasi di sektor makanan, minuman, dan rekreasi dengan meningkatkan kapasitas pasokan lokal.

**Pengeluaran
Wisatawan
Mancanegara
(USD/Kunjungan)**

Latar Belakang

Angka capaian rata-rata pengeluaran wisman diperoleh dari perhitungan *Average Spending Per Arrival* (ASPA) wisman dari data yang diperoleh dari BPS. Spending atau pengeluaran wisman adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran wisman antara lain untuk akomodasi, makan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan/ kecantikan, kursus/ pelatihan, rekreasi, paket wisata lokal, jasa pemandu wisata, dan pengeluaran lainnya. Data rata-rata spending wisman terdapat dalam statistik pengeluaran wisman, yang dipublikasikan oleh BPS.

Data rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden (wisman) menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) di pintu keberangkatan internasional bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas.

Adapun formula perhitungan rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut

Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara= () Total Pengeluaran Wisman/Jumlah Wisman yang wawancara

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) yang telah terealisasi sebesar USD 1.277,17 atau mencapai 98,24 - 98,46% dari target Tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Mata Uang	USD 1.300 - 1.381, 3	USD1.277, 17	98,24 - 98,46% (Memuaskan)

Capaian rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada triwulan I 2025 yang mencapai USD 1.277,17 didukung oleh peningkatan daya saing dan kualitas destinasi wisata di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari jumlah

wisatawan mancanegara pada triwulan I 2025 yang mencapai 2,74 juta kunjungan, meningkat 7,83% dari triwulan I 2024 sebesar 2,54 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga seperti Thailand (1,91%) dan Singapura (2,30%), maka pertumbuhan kunjungan wisman di Indonesia sebesar 7,83% tergolong solid dan positif.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa rapat untuk mendapatkan profil dan gambaran kondisi lapangan serta memetakan masalah yang dihadapi, antara lain: (i) Diskusi dengan Pengelola Kawasan Toba Kaldera pada 3 Januari 2025, serta (ii) beberapa diskusi dengan BUPP KEK Tanjung Kelayang dan KEK Morotai pada Februari 2025.

2.	Pengumpulan data dan informasi terkait Peningkatan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa rapat untuk mengumpulkan data dan informasi yang menunjang penyelesaian masalah yang dipetakan sebelumnya, antara lain: (i) Diskusi Pengembangan Konektivitas dan Rute Destinasi dengan Kemenhub pada 6 Februari 2025 dan (ii) diskusi terkait kajian harga tiket pesawat dengan Prospera pada Februari 2025.
----	--	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat pembahasan isu strategis pariwisata dengan Kementerian BUMN pada 16 Januari 2025
2. Mengikuti rapat kerja nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun 2024 pada 25 Januari 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Pemetaan isu strategis pariwisata dan *cross cutting issue* dengan Asdep BUMN Pariwisata Kemenko Perekonomian.
2. Mendapatkan evaluasi tahun 2024 mengenai KEK Tanjung Kelayang dan Morotai, untuk menetapkan strategi tindak lanjut peningkatan konektivitas dan aksesibilitas

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utama dalam mencapai target Triwulan I Tahun 2025 adalah ketidakpastian perekonomian global yang kurang kondusif sehingga menyebabkan penurunan daya beli wisatawan mancanegara. Ketidakpastian tersebut berasal dari berbagai kebijakan negara besar yang berdampak global sekaligus kebijakan transisi pemerintahan baru di beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu. Kendala global tersebut diperparah dengan kondisi nasional yang belum sehat, seperti kurangnya promosi yang efektif dan terarah, kurangnya variasi pilihan produk dan jasa wisata, serta konektivitas menuju destinasi wisata yang kurang memadai. Promosi yang tidak efektif berdampak pada ketidaktahuan wisatawan mancanegara terhadap ragam produk dan jasa yang ditawarkan di destinasi wisata. Ketika sudah mengetahui produk dan jasa pariwisata pun, terkadang variasinya terbatas dan tidak sesuai dengan preferensi pribadi. Hal tersebut diperparah dengan akses yang sulit untuk mendapatkan produk dan jasa pariwisata tersebut. Permasalahan domino tersebut menghambat pencapaian target jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyelesaian permasalahan ekosistem pariwisata. Dengan memperbaiki ekosistem, mulai dari promosi, produk, hingga akses, pemerintah dapat menciptakan daya tarik yang lebih kuat dan berkelanjutan. Promosi yang efektif dan terarah, berbasis data preferensi pasar, akan meningkatkan awareness wisatawan mancanegara terhadap potensi Indonesia sekaligus membangun citra destinasi yang kompetitif. Diversifikasi produk dan jasa wisata sesuai tren global, seperti ekowisata, *wellness*, dan *digital nomad tourism*, akan memperluas pilihan yang sesuai dengan selera wisatawan serta mendorong belanja lebih besar. Dengan ekosistem yang sehat, keterbatasan daya beli wisatawan akibat kondisi global dapat diimbangi oleh peningkatan nilai tambah pengalaman wisata di Indonesia, sehingga target pengeluaran wisatawan mancanegara lebih realistis untuk dicapai meskipun menghadapi tantangan eksternal.
2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas. Perbaikan konektivitas fisik melalui transportasi udara, laut, dan darat yang terintegrasi dengan destinasi, ditambah konektivitas digital melalui platform reservasi dan informasi yang andal, akan memudahkan wisatawan mengakses layanan pariwisata. Wisatawan mancanegara dapat lebih mudah menjangkau lokasi wisata meskipun daya beli global sedang tertekan. Konektivitas yang lancar juga akan memperkuat efektivitas promosi, sebab informasi tentang destinasi akan lebih meyakinkan bila diikuti dengan akses perjalanan yang jelas dan terjangkau. Selain itu, aksesibilitas yang lebih

baik membuka peluang pengembangan variasi produk dan jasa wisata di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan sesuai preferensi mereka.

3. Perbaikan tata kelola destinasi pariwisata. Dengan tata kelola yang lebih profesional, promosi destinasi dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan sesuai target pasar sehingga wisatawan mancanegara memperoleh informasi yang jelas mengenai ragam produk wisata Indonesia. Tata kelola yang baik juga mendorong diversifikasi produk dan jasa wisata melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal, sehingga variasi penawaran lebih sesuai dengan preferensi wisatawan global, mulai dari ekowisata, wisata budaya, hingga *wellness tourism*. Selain itu, tata kelola yang terintegrasi memastikan perbaikan akses dan konektivitas menuju destinasi melalui sinergi lintas sektor, sehingga perjalanan wisatawan menjadi lebih mudah dan efisien.
4. Perumusan kebijakan pembiayaan pengembangan pariwisata. Skema pembiayaan yang inklusif dan terarah memungkinkan pelaku industri pariwisata memperkuat promosi internasional berbasis digital, sehingga mampu menjangkau wisatawan mancanegara secara lebih efektif di tengah penurunan daya beli akibat ketidakpastian global. Pada saat yang sama, dukungan pembiayaan mendorong diversifikasi produk dan jasa wisata, mulai dari ekowisata, *wellness tourism*, hingga paket wisata berbasis budaya, yang meningkatkan variasi sesuai preferensi pasar.

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: **Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Latar Belakang

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (Indeks Efektivitas SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:

1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis

5. Pengembangan Pariwisata

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 yang didasarkan pada tren-tren tahun sebelumnya. Adapun target triwulan I juga ditetapkan dengan nilai yang sama. Hingga Triwulan I Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang telah terealisasi dengan nilai Indeks 4 atau mencapai 133% dari target Tahun 2025 sebesar nilai Indeks 3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan	Indeks	3 dari 4	4	133% (Memuaskan)

Perhitungan realisasi tersebut didasarkan atas pencapaian efektivitas pelaksanaan KSP di masing-masing Asisten Deputi dibawah lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada triwulan I 2025, setiap Asisten Deputi telah melakukan proses KSP secara efektif yang dibuktikan dengan nilai efektivitas sebesar 100. Adapun isu strategis terkait pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil menjadi isu yang dikoordinasikan paling efektif dibandingkan dengan isu lainnya dengan nilai 117,29. Ringkasan realisasi nilai efektivitas KSP untuk masing-masing Asisten Deputi dan perhitungan nilai Indeks Efektivitas KSP Kedeputusan adalah sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Realisasi TW I
1	Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka	100.00
2	Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	117.29
3	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	111.80
4	Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis	100.00
5	Pengembangan Pariwisata	100.00

$$\text{Indeks KSP Deputi} = \sqrt[5]{100 \times 117,29 \times 111,80 \times 100 \times 100} = 105,57$$

Hasil akhir nilai Indeks KSP Deputi adalah 105,57 yang berada pada rentang sangat efektif (nilai Indeks 4).

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi permasalahan kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan awal serta identifikasi kendala/permasalahan terkait beberapa kebijakan di Industri Agro meliputi komoditas Kelapa, Garam, Tembakau, Gandum, Kelapa Sawit, dan Ubi Kayu. • Pemetaan awal serta identifikasi kendala/permasalahan terkait beberapa kebijakan di Industri Kimia dan Farmasi meliputi Industri Kimia Hulu, Hilir, SKPB GNL, Kosmetik, Petrokimia, Bahan Baku Obat (BBO), Garam Farmasi, Fitofarmaka, industri plastik, dan industri sarung tangan karet. • Pemetaan awal serta identifikasi kendala/permasalahan serta evaluasi kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Aksesoris, dan Alas Kaki
2.	Identifikasi permasalahan kebijakan terkait Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Terlaksana	Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

			<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, telah dilaksanakan <i>initial discussion</i> dengan Prospera pada 19 Maret 2025 yang membahas beberapa faktor yang menyebabkan TPAK Perempuan rendah. • Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja, telah diterbitkan PP No. 6/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tanggal 7 Februari 2025. • Telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian hak-hak pekerja PT Sritex pasca PHK dan Rencana Penyaluran Pekerja pada Industri pada tanggal 3 Maret 2025.
3.	Identifikasi permasalahan kebijakan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 4 Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas dengan K/L terkait serta mengeksplorasi

			skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan
4.	Identifikasi permasalahan kebijakan Penyelesaian PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Percepatan Penambahan Pengadaan Tanah Proyek PSN Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada tanggal 13 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Usulan Realokasi Lintas Sektor Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2025 pada tanggal 13 Januari 2025. Telah dilaksanakan Rapat Usulan Alokasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2026 pada tanggal 30 Januari 2025.
5.	Identifikasi permasalahan kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat – rapat koordinasi dengan stakeholder terkait
6.	Identifikasi permasalahan kebijakan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat – rapat koordinasi dengan stakeholder terkait

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait guna mendapatkan

gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan Solusi terhadap masalah tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan optimalisasi pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dengan menggunakan media daring. sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 10.000.000 Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan dukungan layanan pimpinan yang akan dilakukan pada periode triwulan II

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya blokir anggaran pada Sebagian besar mata anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan koordinasi

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyesuaian target triwulan I dikarenakan capaian triwulan II tidak mencapai target
2. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor penyelesaian isu strategis

6

Sasaran Program 6:

Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: **Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja berupa nilai indeks kepuasan Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3	100% (Memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan

	TW I		
1.	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I	Terlaksana	Penyiapan survei telah dilakukan melalui penyusunan daftar pertanyaan responden survei dan penentuan responden Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang melibatkan setiap PIC di keasdepan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputan lain mengenai Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian masing-masing unit kerja juga memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.400.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 30 orang). Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk anggaran kegiatan yang lebih membutuhkan seperti melakukan monitoring langsung ke lapangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

7	<p>Sasaran Program 7:</p> <p>Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas</p>
---	--

Pencapaian Sasaran Program 7: **Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase
Pelaksanaan
Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi
Deputy Bidang
Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan,
dan Pariwisata

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target triwulan I sebesar 20%.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 23,6% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU- 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persen	20%	20%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Dialog Kinerja Deputy	Terlaksana	Rapat Internal Deputy V Tanggal 6 Januari 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan benchmarking dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan rapat di kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 86.710.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan strategis Kedeputian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Reorganisasi dan perubahan nomenklatur di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menuntut penyesuaian tugas, fungsi, dan struktur organisasi.
2. Belum ditetapkannya Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dialog kinerja di berbagai tingkatan (Kedeputian, Keasdepan, Sekretariat Deputy) dengan melibatkan lintas unit kerja.

Jakarta, 15 April 2025

**Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata**